



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Januari 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)  
**UNIT KERJA** : DEWAN PENGAWAS

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : GUSRIZAL
2. Jabatan : KETUA DEWAN PENGAWAS
3. NHK : 14037

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>3.760.000.000</b>
1. Tanah Seluas 265 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000		
2. Tanah Seluas 216 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.150.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 593 m2/124 m2 di KAB / KOTA KOTA BUKITTINGGI , HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000		
4. Tanah Seluas 240 m2 di KAB / KOTA KOTA BUKITTINGGI , HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000		
5. Tanah Seluas 393 m2 di KAB / KOTA BATANG HARI, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000		
6. Tanah Seluas 192 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.540.000.000</b>
1. MOBIL, HONDA HONDA CRV Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000		
2. MOBIL, FORD EVEREST Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 790.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>103.250.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>200.000.000</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>3.171.208.280</b>



## F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----

Rp. 8.774.458.280

## III. HUTANG

Rp. ----

## IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 8.774.458.280

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.